



Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program

Dian Astuti

Staf Pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Email: dyanafika1212@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah merupakan tantangan utama yang membutuhkan strategi terintegrasi. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program pemerintah, termasuk Gercep Gaskan Berdaya dan PADUNGKU, dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data sekunder dari Pemutakhiran P3KE 2023 dan BPS 2024 dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0,64% selama periode 2023-2024, dengan penurunan signifikan di Donggala (0,95%) dan Poso (0,93%). Program *Gercep Gaskan Berdaya* yang mengombinasikan bantuan tunai dan pelatihan kewirausahaan berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, namun distribusi bantuan sering terhambat di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Namun, kabupaten Parigi Moutong dan Poso masih memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi, sehingga memerlukan intensifikasi program. Meskipun program-program yang ada telah menunjukkan hasil positif, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada perbaikan akses infrastruktur, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Konvergensi dan inovasi program sosial-ekonomi, serta peningkatan akses infrastruktur, terbukti efektif, meskipun masih ada tantangan di daerah terpencil. Pendekatan komprehensif dan peningkatan koordinasi diperlukan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.

Kata Kunci: Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Program Intervensi Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, Akses Infrastruktur.

Abstract

Extreme poverty in Central Sulawesi remains a significant challenge that demands an integrated strategy. This study evaluates the effectiveness of government programs, including Gercep Gaskan Berdaya and PADUNGKU, in accelerating the eradication of extreme poverty. Secondary data from the 2023 P3KE Update and the 2024 BPS were analyzed using multiple linear regression. The findings reveal a 0.64% reduction in extreme poverty during the 2023-2024 period, with notable declines in Donggala (0.95%) and Poso (0.93%). The "Gercep Gaskan Berdaya" program, which combines cash assistance and entrepreneurial training, successfully increased the income of impoverished households; however, aid distribution often faced challenges in areas with limited access. Despite these efforts, Parigi Moutong and Poso districts still have the highest numbers of people living in extreme poverty, indicating a need for program intensification. While existing programs have shown positive outcomes, long-term success heavily depends on improving infrastructure access, enhancing cross-sectoral coordination, and providing better basic services. The convergence and innovation of socio-economic programs, along with improved infrastructure access, have proven effective, although challenges persist in remote areas. A comprehensive approach and enhanced coordination are required to meet the target of eradicating extreme poverty by 2024.

Keywords: Extreme Poverty Eradication, Social Intervention Programs, Economic Empowerment, Infrastructure Access.

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks global, kemiskinan ekstrem diartikan sebagai kondisi di mana pendapatan individu berada di bawah batas kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu USD 1,90 per hari (Sumner et al., 2020). Di Indonesia, meskipun telah terjadi berbagai kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem tetap menjadi masalah yang kompleks dan mendesak, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa 45.773 jiwa pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tersebut. Kabupaten-kabupaten seperti Poso, Donggala, dan Tojo Una-Una adalah contoh daerah di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi, mencerminkan ketimpangan sosial yang membutuhkan perhatian segera (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penanganan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah merupakan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Melalui berbagai program, seperti "Pemutakhiran P3KE" (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), pemerintah berupaya memanfaatkan data berbasis survei untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan melaksanakan intervensi yang sesuai. Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah Program Padat Karya "PADUNGKU," yang melibatkan masyarakat miskin ekstrem dalam kegiatan produktif seperti pemeliharaan jaringan irigasi. Program ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur lokal, tetapi juga untuk memberikan pekerjaan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, dengan upah di atas nilai minimum regional, guna meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka (Setiawan et al., 2022).

Namun, efektivitas program-program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah koordinasi antar sektor dan ketersediaan data yang akurat dan up-to-date. Sulawesi Tengah, dengan kondisi geografis yang beragam, mencakup wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan kurangnya konektivitas antarwilayah. Faktor ini mengakibatkan distribusi bantuan sosial dan implementasi program pemberdayaan masyarakat berjalan lambat, terutama di daerah yang memiliki komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi kelompok utama penerima manfaat program pengentasan kemiskinan (Wijaya & Prabowo, 2021). Tantangan lainnya adalah belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mengakibatkan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Kusuma et al., 2020).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat konvergensi, yaitu integrasi program sosial dan ekonomi, memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan ekstrem secara lebih efektif. Program "Gercep Gaskan Berdaya," yang menargetkan kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) di Sulawesi Tengah, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan strategi konvergensi tersebut. Program ini mengkombinasikan bantuan keuangan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberdayakan keluarga miskin ekstrem agar mampu meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri (Santoso et al., 2023). Pendekatan konvergensi juga melibatkan intervensi di sektor kesehatan dan pendidikan, dengan integrasi program penurunan stunting dan peningkatan gizi keluarga miskin ekstrem, yang seringkali berhubungan erat dengan status sosial ekonomi masyarakat (Setiawati & Hendrawan, 2021).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Beberapa penelitian mencatat bahwa meskipun program-program seperti Gercep Gaskan Berdaya telah berhasil meningkatkan pendapatan beberapa keluarga, program ini belum menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil (Suryana et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah serta optimalisasi penggunaan data untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran (Harahap, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah.

Studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program-program yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, guna mendukung tercapainya target pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024.

METODE

Material

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data utama dari penelitian ini adalah laporan dari Pemutakhiran Data P3KE tahun 2023, yang mencakup informasi tentang rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen yang dibuat oleh Bappeda Sulawesi Tengah juga mengandung data tambahan mengenai indikator makro ekonomi, tingkat kemiskinan, dan laporan perkembangan program pemberdayaan seperti "Gercep Gaskan Berdaya" dan "PADUNGKU". Selain itu, untuk mendukung analisis, laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah tentang perkembangan kemiskinan pada tahun 2023-2024 digunakan.

Persiapan Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari statistik kemiskinan, laporan pelaksanaan program, dan indikator kesejahteraan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui Bappeda dan BPS. Data ini meliputi jumlah penduduk miskin ekstrem, distribusi geografis, dan rincian program intervensi yang diterapkan di setiap kabupaten. Data dari P3KE mengandung informasi rumah tangga miskin yang diperbarui berdasarkan hasil musyawarah desa, sementara data dari BPS memuat perbandingan angka kemiskinan di berbagai kabupaten dari tahun 2023 hingga 2024.

Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *content analysis* terhadap dokumen dan laporan resmi pemerintah. Setiap program seperti "Gercep Gaskan Berdaya," "PADUNGKU," dan "Tetra Pandu" dianalisis berdasarkan tujuan, pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan. Selain itu, data statistik mengenai distribusi rumah tangga miskin ekstrem di setiap kabupaten dianalisis untuk mengidentifikasi wilayah yang menjadi fokus utama intervensi kebijakan pemerintah.

Parameter yang Diukur

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa parameter utama, antara lain:

- Distribusi Kemiskinan Ekstrem: Jumlah rumah tangga miskin ekstrem di setiap kabupaten/kota berdasarkan data P3KE 2023.
- Program Intervensi: Cakupan dan implementasi program-program pengentasan kemiskinan ekstrem seperti bantuan tunai, pelatihan ekonomi produktif, dan bantuan pangan.
- Dampak Program: Indikator yang diukur meliputi penurunan persentase kemiskinan ekstrem, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Analisis Statistik

Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tren pertumbuhan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah dari tahun 2023 hingga 2024. Tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota ditampilkan dalam grafik dan tabel. Tujuannya adalah untuk menemukan hubungan antara pelaksanaan program dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan yang diterapkan dan membuat saran untuk perbaikan.

Pendekatan analisis kuantitatif dengan metode regresi linier berganda digunakan untuk mengukur hubungan antara beberapa variabel independen terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah periode Maret 2023 hingga Maret 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Provinsi Sulawesi Tengah. Data tingkat kemiskinan ekstrem dan perkembangan penurunannya di setiap kabupaten/kota didasarkan pada laporan resmi BPS yang diterbitkan pada tahun 2024, yang mencakup perubahan persentase kemiskinan di Sulawesi Tengah selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024 (BPS, 2024)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penurunan persentase kemiskinan ekstrem, diukur dari selisih antara tingkat kemiskinan pada Maret 2023 dan Maret 2024 di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Variabel independen yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. Akses terhadap air bersih: Diukur dalam persentase penduduk di setiap kabupaten/kota yang memiliki akses ke air bersih.
2. Penduduk tidak bekerja: Jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan di masing-masing kabupaten/kota.
3. Penerima bantuan PANADA: Jumlah penerima bantuan sosial PANADA di masing-masing kabupaten/kota.
4. Penduduk tidak bersekolah: Jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Model regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Di mana Y adalah penurunan tingkat kemiskinan, X_1 adalah akses air bersih, X_2 adalah jumlah penduduk tidak bekerja, X_3 adalah penerima bantuan PANADA, dan X_4 adalah jumlah penduduk tidak bersekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perkembangan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah serta distribusi rumah tangga miskin ekstrem. Selain itu, informasi mengenai program-program bantuan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2024-2025 juga dianalisis untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data memperlihatkan perubahan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024 (Tabel 1). Data ini memberikan gambaran umum mengenai efektivitas program intervensi yang telah dilaksanakan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Tabel ini juga menunjukkan perbandingan antar kabupaten dalam penurunan tingkat kemiskinan, yang dapat digunakan untuk menilai daerah-daerah mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sulawesi Tengah 2023-2024

<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Maret 2023</i>	<i>Maret 2024</i>	<i>Perubahan</i>
Banggai	6.94%	6.56%	-0.38
Poso	15.16%	14.23%	-0.93
Donggala	16.25%	15.30%	-0.95
Tolitoli	12.85%	12.45%	-0.40
Buol	13.36%	13.08%	-0.28
Morowali	12.31%	11.55%	-0.76
Banggai Kep.	12.90%	12.32%	-0.58
Parigi Moutong	14.91%	14.20%	-0.71
Tojo Una-Una	16.74%	16.36%	-0.38
Sigi	12.83%	12.06%	-0.77
Banggai Laut	14.15%	13.78%	-0.37
Morowali Utara	12.85%	11.95%	-0.90
Kota Palu	6.56%	5.94%	-0.62
Total	12.41%	11.77%	-0.64

Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Tabel 1 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah selama periode 2023-2024, dengan total penurunan sebesar 0,64%. Kabupaten Donggala dan Poso mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 0,95% dan 0,93%. Hal ini dapat dikaitkan dengan implementasi program bantuan sosial dan intervensi pembangunan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi.

Berdasarkan data menunjukkan distribusi jumlah penduduk miskin ekstrem di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2024 beragam (Tabel 2). Kabupaten Parigi Moutong dan Poso mencatat

jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi, yang menunjukkan bahwa upaya intervensi yang lebih intensif diperlukan di wilayah ini untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem.

Upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong dan Poso sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin sangat krusial, mengingat jumlah penduduk miskin yang besar dan tersebar di berbagai wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Miskin Ekstrem di Sulawesi Tengah 2024

<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem</i>
Banggai	5,610
Banggai Laut	3,080
Banggai Kepulauan	1,600
Tojo Una-Una	5,370
Poso	9,030
Morowali	4,080
Morowali Utara	4,100
Parigi Moutong	32,570
Tolitoli	3,640
Buol	2,110
Donggala	11,070
Sigi	6,190
Kota Palu	6,570
Total	95,020

Sumber: BPS Maret 2022.

Tabel 3 merinci program bantuan yang dilaksanakan pada tahun 2025, termasuk Bantuan Sosial PANADA dan Gercep Gaskan Berdaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin ekstrem. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai dan mendorong kemandirian ekonomi.

Data yang digunakan untuk menghitung regresi linier berganda mencakup informasi mengenai penurunan kemiskinan ekstrem, akses air bersih, penduduk tidak bekerja, penerima bantuan PANADA, dan penduduk tidak bersekolah di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Tabel 3. Program Bantuan Sosial dan Ekonomi untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem (2025)

Program	Alokasi Bantuan	Sasaran Penerima
Bantuan Sosial PANADA	Rp 200.000/KPM	68,490 KPM
Bantuan Sosial Gercep	Rp 1 juta/KK	12,009 KK
Bantuan UMKM	Rp 10 juta/KPM	40,000 KPM

Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh berbeda terhadap penurunan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota. Akses air bersih berkontribusi positif (koefisien 0,00117), sementara penduduk tidak bekerja berkontribusi negatif (-0,00022). Penerima bantuan PANADA (0,000031) dan penduduk tidak bersekolah (0,000064) juga berkontribusi positif meskipun kecil. Nilai intercept sebesar 0,562 menunjukkan tingkat kemiskinan saat semua variabel bernilai nol.

Berdasarkan hasil regresi ini, terlihat bahwa akses terhadap air bersih memiliki pengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan, di mana peningkatan akses air bersih sebesar 1% akan meningkatkan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0.00117%. Sebaliknya, penduduk tidak bekerja memiliki pengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan, dengan koefisien -0.00022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang tidak bekerja, semakin lambat penurunan kemiskinan ekstrem.

Tabel 4. Data Penurunan Kemiskinan, Akses Air Bersih, Penduduk Tidak Bekerja, Penerima Bantuan PANADA, dan Penduduk Tidak Bersekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (2023-2024)

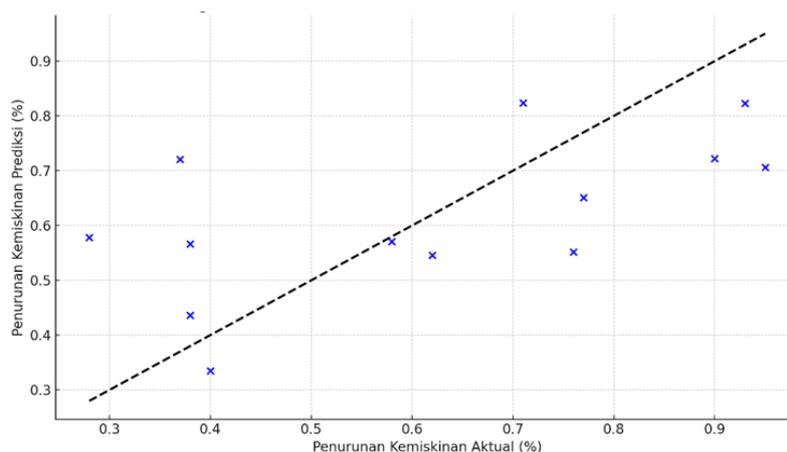
Kabupaten/Kota	Penurunan Kemiskinan (%) (Y)	Akses Air Bersih (%) (X ₁)	Penduduk Tidak Bekerja (X ₂)	Penerima Bantuan PANADA (X ₂)	Penduduk Tidak Bersekolah (X ₃)
Banggai	0.38	75.64	3,498	5,610	6,021
Poso	0.93	56.49	1,382	9,030	3,402
Donggala	0.95	45.32	3,070	11,070	6,632
Tolitoli	0.40	61.87	3,027	3,640	4,029
Buol	0.28	50.23	1,510	2,110	3,529
Morowali	0.76	52.78	1,505	4,080	2,089
Bangkep	0.58	45.92	1,212	1,600	2,713
Parigi Moutong	0.71	63.54	6,461	32,570	9,360
Tojo Una Una	0.38	58.21	2,373	5,370	4,589
Sigi	0.77	59.62	2,327	6,190	5,322
Banggai Laut	0.37	47.89	825	3,080	2,953
Morowali Utara	0.90	49.98	1,098	4,100	3,381
Kota Palu	0.62	74.43	2,965	6,570	5,434

Keterangan:

Penurunan Kemiskinan (%): Perbedaan persentase kemiskinan ekstrem antara Maret 2023 dan Maret 2024; Akses Air Bersih (%): Persentase penduduk di setiap kabupaten/kota yang memiliki akses ke air bersih; Penduduk Tidak Bekerja: Jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota yang tidak bekerja; Penerima Bantuan PANADA: Jumlah penerima bantuan sosial PANADA di setiap kabupaten/kota; Penduduk Tidak Bersekolah: Jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah

Program bantuan PANADA dan jumlah penduduk tidak bersekolah juga menunjukkan pengaruh positif, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan akses air bersih. Prediksi penurunan kemiskinan ekstrem di setiap kabupaten/kota berkisar antara 0.33% hingga 0.82%, dengan Poso dan Parigi Moutong sebagai kabupaten yang memiliki penurunan kemiskinan tertinggi.

Pembahasan



Gambar 1. Regresi linier berganda penurunan kemiskinan aktual dengan penurunan kemiskinan prediksi

Penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah pada periode 2023-2024 menunjukkan adanya dampak positif dari program-program intervensi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Data yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan. Kabupaten Donggala dan Poso, misalnya, masing-masing mencatat penurunan sebesar 0,95% dan 0,93%. Hal ini sejalan dengan temuan Luhur et al. (2022) yang menyatakan bahwa program padat karya, seperti yang diterapkan di Sulawesi Tengah, memiliki efek jangka pendek dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin melalui penciptaan lapangan kerja sementara di sektor infrastruktur.

Selain itu, distribusi penduduk miskin ekstrem yang ditunjukkan pada Tabel 2 menyoroti tantangan yang lebih besar di kabupaten-kabupaten tertentu. Kabupaten Parigi Moutong dan Poso mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi, masing-masing sebesar 32.570 dan 9.030 jiwa. Studi oleh Gunawan et al. (2021) menekankan bahwa wilayah dengan konsentrasi kemiskinan ekstrem yang tinggi biasanya berada di daerah terpencil, di mana akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan masih terbatas. Oleh karena itu, intervensi yang diterapkan harus berfokus pada peningkatan akses infrastruktur serta integrasi program bantuan sosial dengan program pengembangan ekonomi lokal, seperti yang dilakukan melalui program "Gercep Gaskan Berdaya" di Sulawesi Tengah.

Program bantuan sosial yang diimplementasikan pada tahun 2025, seperti Bantuan Sosial PANADA dan program Gercep Gaskan Berdaya, juga berpotensi untuk secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Berdasarkan penelitian oleh Santoso et al. (2020), bantuan tunai yang dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha terbukti efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi di kalangan rumah tangga miskin. Dalam konteks Sulawesi Tengah, program ini dirancang untuk mendukung kelompok rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses ke bantuan ekonomi produktif, dengan target sebanyak 40.000 rumah tangga yang menerima bantuan modal usaha (Pemda Sulteng, 2024).

Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi program ini adalah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Menurut Wijaya et al. (2021), salah satu hambatan utama dalam program pengentasan kemiskinan di daerah terpencil adalah masalah distribusi bantuan yang sering kali terhambat oleh keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus lebih berfokus pada peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama di kabupaten-kabupaten seperti Parigi Moutong dan Poso, di mana tingkat kemiskinan ekstrem masih tinggi.

Secara keseluruhan, program-program yang telah diimplementasikan di Sulawesi Tengah menunjukkan hasil yang positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun masih diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Hal ini mencakup integrasi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur untuk memudahkan akses ke layanan dasar bagi masyarakat miskin ekstrem (Kusuma & Prasetyo, 2023). Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi, diharapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat tercapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih sangat signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peningkatan akses air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Kabupaten/kota dengan akses air bersih yang lebih tinggi seperti Banggai dan Kota Palu menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih besar.

Sebaliknya, tingkat pengangguran (penduduk tidak bekerja) memiliki pengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa meskipun program-program bantuan sosial seperti PANADA dan bantuan pangan telah menjangkau masyarakat, keberlanjutan program-program ini perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. Kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran tinggi, seperti Parigi Moutong dan Sigi, cenderung menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih lambat. Program seperti PANADA yang dirancang oleh pemerintah melalui kerangka P3KE tahun 2023 bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin, namun membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023).

Program PANADA dan jumlah penerima manfaatnya juga berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan ekstrem. Namun, peningkatan dampak dari program ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan keterampilan kerja bagi penerima bantuan, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri dalam jangka panjang (Pemda Sulteng, 2024).

Faktor penduduk tidak bersekolah juga berpengaruh positif, namun kontribusinya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat dalam periode waktu yang lebih singkat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan infrastruktur dasar dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta memastikan program-program bantuan sosial dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

Selain pengaruh positif dari program-program intervensi, penting untuk memperhatikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada bantuan tunai atau program padat karya, tetapi juga pada perbaikan akses ke layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Tabel 2 menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten seperti Parigi Moutong dan Poso memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang besar, yang umumnya juga memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan-layanan ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amartya (1999), kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan, tetapi juga dari ketidakmampuan individu untuk mengakses hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, program intervensi yang menggabungkan bantuan tunai dengan peningkatan akses layanan dasar akan lebih efektif dalam memerangi kemiskinan ekstrem di wilayah-wilayah terpencil.

Program integratif yang menghubungkan pengentasan kemiskinan dengan intervensi nutrisi, seperti program "SIARAN Stunting" yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah, mencerminkan strategi berbasis konvergensi yang didukung oleh berbagai penelitian terbaru. Setiawati dan Hendrawan (2021) menemukan bahwa penurunan angka stunting berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperbaiki status gizi dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Contoh konkret dari dampak program intervensi pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada pelaksanaan program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Donggala. Program ini dirancang untuk membantu rumah tangga miskin ekstrem dengan memberikan akses ke kegiatan produktif, seperti pertanian dan perikanan, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan. Sebagai hasilnya, Donggala mencatat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,95% selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada intervensi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat secara langsung melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Selain itu, program "Gercep Gaskan Berdaya" yang menggabungkan bantuan tunai dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Santoso et al. (2020) menemukan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam menciptakan usaha kecil yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga secara berkelanjutan. Namun, penelitian lain oleh Suryana et al. (2019) menekankan bahwa agar program seperti ini berhasil, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis yang memadai untuk memastikan usaha kecil tersebut tetap bertahan.

Tantangan utama dalam implementasi program-program tersebut tetap terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan akses geografis. Beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, terutama di daerah kepulauan dan pegunungan, memiliki keterbatasan akses transportasi yang menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program. Wijaya et al. (2021) menyatakan bahwa investasi infrastruktur, terutama jalan dan transportasi, sangat penting untuk memperbaiki keterjangkauan layanan publik di daerah-daerah tersebut. Dengan demikian, selain intervensi ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi elemen penting dalam strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah ini.

Tantangan lainnya terkait dengan kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengintegrasikan berbagai program intervensi. Misalnya, meskipun ada program peningkatan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, sering kali tidak diikuti dengan peningkatan program kesehatan atau pendidikan yang relevan, sehingga dampak penurunan kemiskinan ekstrem tidak maksimal (Pemda Sulteng, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih konvergen, di mana intervensi di sektor ekonomi diimbangi dengan perbaikan di sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan, untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan.

Mempertimbangkan seluruh aspek ini, dapat diambil hasil sementara bahwa meskipun program-program intervensi yang diterapkan di Sulawesi Tengah telah menunjukkan hasil yang positif, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada sinergi antara berbagai sektor, peningkatan akses infrastruktur, dan integrasi program-program sosial dan ekonomi yang komprehensif. Peningkatan konektivitas wilayah terpencil dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik akan menjadi kunci untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan akses air bersih dan konvergensi program sosial-ekonomi, seperti PANADA dan Gercep Gaskan Berdaya, berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah. Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan juga diperlukan, karena jumlah penduduk yang tidak bekerja memperlambat penurunan kemiskinan. Inovasi program melalui pemberdayaan ekonomi terbukti efektif, meskipun dampaknya lebih kecil di daerah terpencil seperti Parigi Moutong dan Poso. Program seperti *Gercep Gaskan Berdaya* dan *PADUNGKU* berhasil menurunkan

kemiskinan, dengan penurunan total sebesar 0,64% pada periode 2023-2024. Namun tantangan terbesar masih terdapat di wilayah terpencil seperti Parigi Moutong. Namun, daerah-daerah seperti Parigi Moutong dan Poso masih memiliki konsentrasi penduduk miskin ekstrem yang tinggi, menyoroti perlunya intensifikasi program di wilayah tersebut. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah aksesibilitas di daerah terpencil, yang menghambat distribusi bantuan secara merata. Peningkatan konektivitas wilayah dan cakupan program diperlukan untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini. selain itu kepada jajaran Pimpinan dan rekan kerja yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data kemiskinan di Sulawesi Tengah*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Penurunan Kemiskinan di Sulawesi Tengah*. Jakarta: BPS.
- Gunawan, T., Nugroho, P., & Prasetyo, M. (2021). Aksesibilitas layanan dasar di daerah terpencil: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 10(2), 123-138.
- Harahap, R. (2020). Pengaruh program perlindungan sosial terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 9(2), 113-128.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). (2023). *Program P3KE Tahun 2023*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Kusuma, A., & Prasetyo, D. (2023). Evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 12(1), 57-72.
- Kusuma, A., et al. (2020). Koordinasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 45-58.
- Luhur, R., & Suryanto, A. (2022). Dampak program padat karya terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 9(4), 311-326.
- [Pemda Sulteng] Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). *Paparan Gubernur Sulawesi Tengah dalam Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024*. Jakarta: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Santoso, D., et al. (2023). Inovasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Gercep Gaskan Berdaya di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(3), 213-227.
- Santoso, D., Setiawan, B., & Suryadi, I. (2020). Pemberdayaan ekonomi melalui program Gercep Gaskan Berdaya: Studi kasus di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(2), 213-227.
- Setiawan, B., et al. (2022). Padat Karya dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Regional*, 15(4), 101-119.
- Setiawati, L., & Hendrawan, A. (2021). Konvergensi program penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Gizi Masyarakat*, 7(2), 56-63.
- Setiawati, L., & Hendrawan, A. (2021). Konvergensi program penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Gizi Masyarakat*, 7(2), 56-63.
- Sumner, A., et al. (2020). Global poverty and COVID-19: Estimates and projections. *World Development*, 137, 105-117.
- Suryana, I., et al. (2019). Evaluasi dampak program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal: Studi kasus Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 79-89.
- Suryana, I., Wijaya, H., & Prabowo, R. (2019). Dinamika kemiskinan ekstrem di daerah terpencil: Evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 79-89.
- Wijaya, H., & Prabowo, R. (2021). Dinamika kemiskinan di wilayah terpencil: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 67-82.
- Wijaya, H., & Prabowo, R. (2021). Pengentasan kemiskinan di wilayah terisolasi: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 67-82.